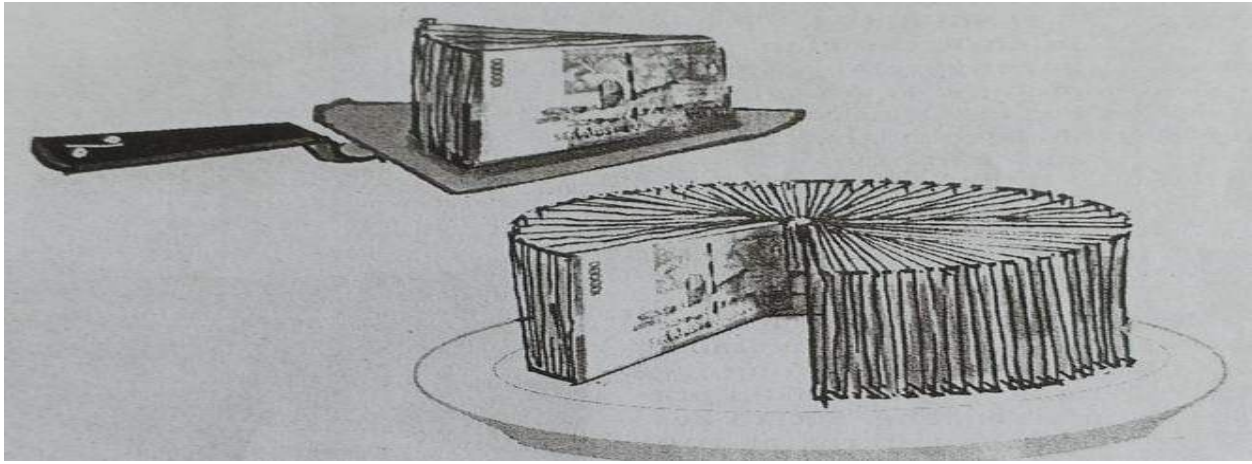


**Pemangkasan Anggaran Tak Ganggu Pembangunan Infrastruktur,
Usulkan Penggunaan Skema *Multiyears***



SUMBER : KORANKALTIM SABTU, 22/02/2025

UJOH BILANG – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mahulu menanggapi kebijakan pemangkasan anggaran sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Utamanya tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 yang tidak berdampak signifikan terhadap pembangunan infrastruktur di kabupaten yang berjuduk *Tanaa Urip Ngeriman* ini.

Hal ini disampaikan oleh Kepala PUPR Mahulu, Didik Subagya kepada Koran Kaltim, Jumat (21/2) yang menegaskan bahwa pemangkasan anggaran tidak menghambat realisasi proyek infrastruktur di wilayah tersebut. Menurut Didik sapaan akrabnya, belanja modal untuk proyek-proyek pembangunan tetap menjadi prioritas utama karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.

"Kami tetap berfokus pada pengembangan infrastruktur, khususnya jalan. Tahun ini, WTP (*Water Treatment Plant*) dan elektrifikasi hampir rampung, tinggal menyelesaikan jaringan listrik menuju Mambes (Mamahak Besar). Nantinya, jaringan listrik di Mambes akan tersambung dengan Ujoh Bilang," ungkap Didik.

Ia menjelaskan, kebijakan pemangkasan anggaran hanya diterapkan pada kegiatan yang bersifat tidak mendesak, seperti perjalanan dinas dan konsumsi rapat, yang telah dikurangi sesuai arahan Presiden bahkan

Gubernur. "Jika di Kementerian PUPR, pemangkasan anggaran dapat ditutup dengan sumber pendanaan alternatif, namun di daerah, pemangkasan berarti penghentian," ucapnya.

"Sementara itu, pembangunan infrastruktur harus tetap berjalan, terlebih di Mahulu, yang masih membutuhkan perhatian khusus dalam aspek ini," lanjutnya. Sehingga terkait pembangunan fasilitas perkantoran permanen untuk beberapa OPD, Didik mengungkapkan bahwa masih terdapat kendala, terutama dalam hal ketersediaan lahan. "Nah untuk perencanaan perkantoran permanen sebenarnya sudah disusun dari tahun lalu. Tapi, pelaksanaannya jadi tertunda karena kesiapan lahan tapak bangunan masih menjadi kendala," tuturnya.

Untuk mengatasi keterbatasan anggaran dan tantangan logistik, Didik mengusulkan penerapan skema *multiyears* dalam pembangunan infrastruktur, khususnya perkantoran dan jalan.

"Kalau cuma mengandalkan satu tahun anggaran, distribusi material pasti jadi kendala. Apa lagi waktu sungai mulai surut di bulan Juni-Juli. Jadi dengan skema *multiyears*, pendanaan dapat lebih diprediksi dan pelaksanaan proyek lebih fleksibel," pungkasnya. **(jih1023/han/ga)**

Sumber Berita :

1. Korankaltim, Pemangkasan Anggaran Tak Ganggu Pembangunan Infrastruktur, Usulkan Penggunaan Skema *Multiyears*, 22/02/2025

Catatan :

Dalam Diktum Keempat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Gubernur dan Bupati/Wali Kota diinstruksikan untuk:

1. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/*focus group discussion*.
2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen).
3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai standar harga satuan regional.
4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki *output* yang terukur.

5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.
6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga.
7. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari transfer ke daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf b.

